

Johnny Patta

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN

Pembiayaan pembangunan dalam perencanaan dan manajemen pembangunan sering dirasakan sebagai aspek paling krusial, artinya pembiayaan pembangunan diletakkan sebagai variabel penentu terhadap keberhasilan suatu perencanaan dan manajemen pembangunan. Terlebih lagi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, keterbatasan dana kerap digunakan sebagai alasan rasional bagi tidak cukup terlayannya usaha peningkatan kebutuhan infrastruktur penduduk baik jumlah maupun kualitas fasilitas pelayanan umum yang lebih baik.

Pendapat di atas umumnya mendominasi pembahasan masalah-masalah pembiayaan pembangunan, karena pembiayaan pembangunan memang merupakan tulang punggung akan keberhasilan suatu rencana dan manajemen pembangunan. Namun demikian ditinjau dari sudut pandang perencanaan dan manajemen pembangunan hal ini juga berlaku sebaliknya. Artinya, tanpa suatu perencanaan dan manajemen pembangunan yang baik maka sulit dihasilkan pembiayaan pembangunan yang dibutuhkan atau dengan kata lain kalau terjadi kesulitan dalam pembiayaan pembangunan maka perencanaan dan manajemen pembangunan mempunyai andil terhadap terjadinya masalah-masalah tersebut. Dari sudut keahlian manajemen pembangunan (khususnya perkotaan), kedua hal ini penting untuk dikuasai. Hal inilah yang menjadi titik tolak permasalahan dan pembahasan dalam tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan perkotaan.

***Rationale** (alasan pokok sebagai landasan berpikir) pembiayaan pembangunan dalam suatu proses perencanaan dan manajemen pembangunan harus diletakkan pada social atau **public choice**. Dasarnya adalah pembiayaan pembangunan memang merupakan manifestasi dari "pilihan masyarakat" terhadap keinginan-keinginan yang diharapkan untuk bisa dicapai yang dituang-*

kan dalam rencana dan manajemen pembangunan. Idealnya, pembiayaan pembangunan dapat memenuhi keinginan dari semua orang di dalam wilayah pembangunan tersebut tanpa ada yang dikecualikan. Karena itu, dalam format pembiayaan dan penganggaran pembangunan yang diusulkan, disahkan, dilaksanakan dan dievaluasi, maka setiap item dalam lajur penerimaan atau pengeluaran; baik yang bersifat satu kali maupun yang berulang; harus selalu tersirat dan secara sadar menyatu dengan pilihan masyarakat terhadap keinginan-keinginannya. Di sinilah letak inti permasalahan bila suatu rencana pembiayaan pembangunan di perdebatkan.

*Dalam praktek pembiayaan pembangunan perkotaan, kondisi ideal tersebut tentu saja **utopia**, karena hampir tidak mungkin untuk menampung keinginan semua orang tanpa terkecualikan. Jalan keluar terdekat untuk memenuhi kondisi ideal umumnya diambil melalui pendekatan majority rule atau representative. Untuk itulah maka ketika eksekutif dan para anggota dewan perwakilan yang terhormat membahas suatu rencana anggaran, maka pilihan masyarakat terhadap keinginan-keinginannya harus selalu menjadi acuan berpijak. Keadaan ini harus tercermin dalam sistem pembiayaan pembangunan perkotaan; baik yang tertuang dalam dana-dana antar pemerintah atau yang bersumber pada pemerintah pusat (intergovernmental transfer); dana dari daerah sendiri atau PADS yang umumnya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah serta pungutan lain; maupun dana-dana pinjaman, hibah, investasi swasta, dan dana yang merupakan partisipasi masyarakat. Atas landasan berpikir itulah pergeseran suatu sumber penerimaan bagi pembiayaan pembangunan, misalnya saat ini bertitik berat pada sumber pendapatan dari pajak adalah memang merupakan "pilihan masyarakat".*

Semoga demikian.